



WALIKOTA MADIUN
SALINAN
PERATURAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR 22 TAHUN 2017
TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PEMERINTAH KOTA MADIUN

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang berdampak pada perubahan nomenklatur dan penanggungjawab Organisasi Perangkat Daerah dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal, maka Peraturan Walikota Madiun Nomor 07 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kota Madiun sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kota Madiun ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal ;
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota ;
9. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor : 22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 ;
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor : 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota ;
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan ;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 ;
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 22/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota ;
15. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor : 55/HK-010/B5/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota ;

16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota ;
17. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.106/HK.501/MKP/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian ;
18. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota ;
19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM. 81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota ;
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 85 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian ;
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ;
22. Peraturan Menteri Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan ;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan ;
24. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PEMERINTAH KOTA MADIUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Madiun.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Walikota adalah Walikota Madiun.
4. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintah Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
5. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah.
6. Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM, adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
7. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
8. Indikator SPM adalah tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM tertentu, berupa masukan, proses, keluaran, hasil dan/atau manfaat pelayanan dasar.
9. Batas waktu pencapaian SPM adalah kurun waktu yang ditentukan untuk mencapai SPM.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk memberikan acuan kepada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan SPM sesuai lingkup tugas dan fungsinya.
- (2) Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Daerah bertujuan agar SPM yang telah disusun dan ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen dapat diterapkan oleh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah sesuai bidang masing-masing.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup SPM meliputi:

- a. jenis layanan dasar;
- b. indikator kerja;
- c. nilai;
- d. batas waktu pencapaian; dan
- e. perodesasi target pencapaian.

BAB IV
PRINSIP-PRINSIP
Pasal 4

SPM disusun sebagai alat Pemerintah Daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib.

BAB V
PENERAPAN
Pasal 5

- (1) SPM disusun dan diterapkan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bidang Pemerintahan Dalam Negeri;
 - b. bidang Kesehatan;
 - c. bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
 - d. bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
 - e. bidang Ketahanan Pangan;
 - f. bidang Pendidikan Dasar;
 - g. bidang Kesenian;
 - h. bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - i. bidang Perumahan Rakyat;

- j. bidang Ketenagakerjaan;
 - k. bidang Sosial;
 - l. bidang Lingkungan Hidup;
 - m. bidang Perhubungan Daerah;
 - n. bidang Komunikasi dan Informatika;
 - o. bidang Penanaman Modal.
- (3) Penjabaran SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

- (1) SPM merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target pelayanan dasar Pemerintah Daerah.
- (2) SPM menjadi acuan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun kebijakan SPM sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada batas waktu pencapaian SPM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategi Perangkat Daerah.
- (3) Penyusunan rencana pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan anggaran kegiatan yang terkait dengan pencapaian SPM dilakukan berdasarkan analisis kemampuan dan potensi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rencana pencapaian target tahunan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta realisasinya diinformasikan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PELAPORAN
Pasal 8

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah penanggungjawab SPM menyusun dan menyampaikan laporan tahunan kinerja dan pencapaian SPM kepada Walikota.
- (2) Walikota menyusun dan menyampaikan laporan umum tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Timur.
- (3) Pemerintah Daerah menyampaikan laporan teknis tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM kepada Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang bersangkutan.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 9

Monitoring dan evaluasi umum terhadap kinerja penerapan dan pencapaian SPM Pemerintah Daerah dilakukan oleh Walikota dibantu oleh Tim Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Daerah.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 10

Pembinaan dan pengawasan umum terhadap kinerja penerapan dan pencapaian SPM Pemerintah Daerah dilakukan oleh Walikota dibantu oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah dan Inspektorat.

BAB IX
PENDANAAN
Pasal 11

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Madiun Nomor 07 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kota Madiun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **MADIUN**
pada tanggal 28 September 2017

WALIKOTA MADIUN,

ttt

H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hum.

Diundangkan di **MADIUN**
pada tanggal 28 September 2017

SEKRETARIS DAERAH,

ttt

Drs. MAIDI, SH, MM, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19610512 198803 1 010

BERITA DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2017
NOMOR 23/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
SEKRETARIS DAERAH
u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM



BUDI WIBOWO, SH

Pembina

NIP. 19750117 199602 1 001

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA MADIUN
 NOMOR : 22 TAHUN 2017
 TANGGAL : 28 September 2017

**PENJABARAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
 KOTA MADIUN**

No.	Bidang	Jenis Pelayanan Dasar	SPM		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)		Periodesasi Target Pencapaian Kota Madiun			Perangkat Daerah Penanggung jawab	
			Indikator	Nilai	Target Nasional	Target Kota Madiun	2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Pemerintahan Dalam Negeri	Pelayanan Kependudukan Dokumen	Cakupan penerbitan kartu keluarga	100%	2015	2014	100%	100%	100%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
			Cakupan penerbitan kartu tanda penduduk	100%	2015	2017	100%	100%	100%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
			Cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran	90%	2020	2020	56.50%	56.75%	60%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
			Cakupan penerbitan kutipan angka kematian	70%	2020	2020	50%	60%	70%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		Pemeliharaan Umum, Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat	Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat	Cakupan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota di Daerah	100%	2015	2014	100%	100%	100%	Satuan Polisi Pamong Praja
			Perawatan dan Ketertiban Masyarakat	Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	3 x patroli dalam sehari	2014	2014	6 x patroli dalam sehari	6 x patroli dalam sehari	6 x patroli dalam sehari	Satuan Polisi Pamong Praja

No.	Bidang	Jenis Pelayanan Dasar	SPM		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)		Periodesasi Target Pencapaian Kota Madiun			Perangkat Daerah Penanggung jawab
			Indikator	Nilai	Target Nasional	Target Kota Madiun	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Penanggulangan Bencana Kebakaran	Cakupan rasio petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Daerah	1 (satu) orang setiap RT atau sebutan lainnya	2014	2014	1 (satu) orang setiap RT atau sebutan lainnya	1 (satu) orang setiap RT atau sebutan lainnya	1 (satu) orang setiap RT atau sebutan lainnya	Satuan Polisi Pamong Praja
			Cakupan pelayanan bencana kebakaran	80%	2015	2014	100%	100%	100%	Satuan Polisi Pamong Praja
			Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>)	75%	2015	2012	100%	100%	100%	Satuan Polisi Pamong Praja
			Persentase aparaturnya pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	85%	2015	2015	85%	85%	85%	Satuan Polisi Pamong Praja
			Jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000-5000 liter pada Wilayah Manajemen Kerja	90%	2015	2013	100%	100%	100%	Satuan Polisi Pamong Praja
2.	Kesehatan		Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	-	-	-	98%	99%	100%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
			Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	-	-	-	98%	99%	100%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
			Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	-	-	-	99%	99.5%	100%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
			Pelayanan Kesehatan Balita	-	-	-	96%	96.5%	97%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
			Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	-	-	-	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana

No.	Bidang	Jenis Pelayanan Dasar	SPM		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)		Periodesasi Target Pencapaian Kota Madiun			Perangkat Daerah Penanggung jawab
			Indikator	Nilai	Target Nasional	Target Kota Madiun	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	-	-	-	55%	57%	60%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
			Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	-	-	-	55%	60%	65%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
			Pelayanan Kesehatan Penderita <i>Hipertensi</i>	-	-	-	50%	51%	52%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
			Pelayanan Kesehatan Penderita <i>Diabetes Melitus (DM)</i>	-	-	-	45%	46%	47%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
			Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	-	-	-	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
			Pelayanan Kesehatan Orang dengan <i>Tuberkulosis</i>	-	-	-	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
			Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	-	-	-	48%	49%	50%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
3	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Komunikasi Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KIE KB dan KS)	A. Cakupan pasangan usia subur yang istrinya dibawah 20 tahun 3,5 %	100	2014	2018	85,71	100	100	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
			B. Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB Aktif 65 %	100	2014	2019	85,63	92,31	100	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
			C. Cakupan pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need) 5%	100	2014	2014	134,2	138	140	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
			D. Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB 70 %	100	2014	2019	95,21	97	100	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana

No.	Bidang	Jenis Pelayanan Dasar	SPM		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)		Periodesasi Target Pencapaian Kota Madiun			Perangkat Daerah Penanggung jawab
			Indikator	Nilai	Target Nasional	Target Kota Madiun	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Penyediaan Alat Kontrasepsi	E. Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB 87 %	100	2014	2019	91,84	93	95	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
			F. Rasio petugas lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) 1 petugas setiap 2 (dua) Kelurahan	100	2014	2014	100	100	100	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
			G. Rasio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 (satu) petugas di setiap kelurahan	100	2014	2014	100	100	100	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
			Cakupan penyediaan alat dan obat Kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 30% setiap tahun	100	2014	2014	100	100	100	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
			Penyediaan Informasi Mikro	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap Kelurahan 100% setiap tahun	100	2014	2014	100	100	100
4.	Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100%	2014	2014	100%	100%	100%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Cakupan ketersediaan petugas di Unit Pelayanan Terpadu yang memiliki kemampuan untuk menindaklanjuti pengaduan/laporan masyarakat	100%	2014	2014	100%	100%	100%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No.	Bidang	Jenis Pelayanan Dasar	SPM		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)		Periodesasi Target Pencapaian Kota Madiun			Perangkat Daerah Penanggung jawab
			Indikator	Nilai	Target Nasional	Target Kota Madiun	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dan Pusat Pelayanan Terpadu /Pusat Krisis Terpadu di RS	100% dari sasaran program	2014	2014	100% dari sasaran program	100% dari sasaran program	100% dari sasaran program	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			a. Cakupan Puskesmas mampu tatalaksana kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	100% dari sasaran program atau 2 Puskesmas mampu tatalaksana kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak setiap Kota	2014	2014	100% dari sasaran program atau 2 Puskesmas mampu tatalaksana kasus kekerasan terhadap perempuan setiap Kota	100% dari sasaran program atau 2 Puskesmas mampu tatalaksana kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak setiap Kota	100% dari sasaran program atau 2 Puskesmas mampu tatalaksana kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak setiap Kota	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			b. Cakupan RSU Vertikal/RSUD/RS Swasta/RS Polri yang melaksanakan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan	60% rumah sakit (A,B,C dari sasaran program) memberikan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan terlatih di	2014	2014	60% rumah sakit (A,B,C dari sasaran program) memberikan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan	60% rumah sakit (A,B,C dari sasaran program) memberikan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan	60% rumah sakit (A,B,C dari sasaran program) memberikan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No.	Bidang	Jenis Pelayanan Dasar	SPM		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)		Periodesasi Target Pencapaian Kota Madiun			Perangkat Daerah Penanggung jawab
			Indikator	Nilai	Target Nasional	Target Kota Madiun	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			c. Cakupan tenaga kesehatan terlatih tentang tatalaksana kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Puskesmas	100% dari sasaran program (minimal 2 orang tenaga kesehatan terlatih di setiap Puskesmas mampu menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak)	2014	2014	100% dari sasaran program (minimal 2 orang tenaga kesehatan terlatih di setiap Puskesmas mampu menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak)	100% dari sasaran program (minimal 2 orang tenaga kesehatan terlatih di setiap Puskesmas mampu menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak)	100% dari sasaran program (minimal 2 orang tenaga kesehatan terlatih di setiap Puskesmas mampu menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak)	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			d. Cakupan tenaga kesehatan terlatih tentang tatalaksana kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Rumah Sakit	100% dari sasaran program (minimal 3 orang tenaga kesehatan terlatih di setiap Rumah Sakit) di suatu wilayah kerja.	2014	2014	100% dari sasaran program (minimal 3 orang tenaga kesehatan terlatih di setiap Rumah Sakit) di suatu wilayah kerja.	100% dari sasaran program (minimal 3 orang tenaga kesehatan terlatih di setiap Rumah Sakit) di suatu wilayah kerja.	100% dari sasaran program (minimal 3 orang tenaga kesehatan terlatih di setiap Rumah Sakit) di suatu wilayah kerja.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No.	Bidang	Jenis Pelayanan Dasar	SPM		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)		Periodesasi Target Pencapaian Kota Madiun			Perangkat Daerah Penanggung jawab
			Indikator	Nilai	Target Nasional	Target Kota Madiun	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	75%	2014	2014	75%	75%	75%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Cakupan petugas rehabilitasi sosial yang terlatih	75%	2014	2014	75%	75%	75%	
		Penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	50%	2014	2015	50%	50%	50%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Cakupan ketersediaan petugas pendamping hukum atau advokat yang mempunyai kemampuan pendampingan pada saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	50%	2014	2015	50%	50%	50%	
5.	Ketahanan Pangan	Ketersediaan dan Cadangan Pangan	Ketersediaan energi dan protein perkapita	90%	2015	2015	95.92%	95.94%	95.96%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			Penguatan Cadangan Pangan	60%	2015	2015	69.65%	69.68%	69.70%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Distribusi dan Akses Pangan	Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah	90%	2015	2015	100%	100%	100%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

No.	Bidang	Jenis Pelayanan Dasar		SPM		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)		Periodesasi Target Pencapaian Kota Madiun			Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Indikator	Nilai	Target Nasional	Target Kota Madiun	2017	2018	2019	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
				Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan	90%	2015	2015	97.96%	97.98%	98%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			Penganeekaragaman dan Keamanan Pangan	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	90%	2015	2019	68.55%	68.58%	70%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
				Pengawasan dan pembinaan Keamanan Pangan	80%	2015	2015	95%	95%	95%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			Penanganan Kerawanan Pangan	Penanganan Daerah Rawan Pangan	60%	2015	2015	100%	100%	100%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
6.	Pendidikan Dasar	Pelayanan Pendidikan Dasar oleh Kota	Sarana dan Prasarana	Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis	100%	2014	2014	100%	100%	100%	Dinas Pendidikan
				Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik.	100%	2014	2014	100%	100%	100%	Dinas Pendidikan

No.	Bidang	Jenis Pelayanan Dasar	SPM		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)		Periodesasi Target Pencapaian Kota Madiun			Perangkat Daerah Penanggung jawab
			Indikator	Nilai	Target Nasional	Target Kota Madiun	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi	100%	2014	2011	100%	100%	100%	Dinas Pendidikan
			untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru							
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan	100%	2014	2011	100%	100%	100%	Dinas Pendidikan
			Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran	100%	2014	2011	100%	100%	100%	Dinas Pendidikan
			Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik	100%	2014	2011	100%	100%	100%	Dinas Pendidikan

No.	Bidang	Jenis Pelayanan Dasar	SPM		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)		Periodesasi Target Pencapaian Kota Madiun			Perangkat Daerah Penanggung jawab
			Indikator	Nilai	Target Nasional	Target Kota Madiun	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% & 20%	100%	2014	2011	100%	100%	100%	Dinas Pendidikan
			Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan PKn	100%	2014	2011	100%	100%	100%	Dinas Pendidikan
			Di kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik	100%	2014	2014	100%	100%	100%	Dinas Pendidikan
			Di kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik	100%	2014	2014	100%	100%	100%	Dinas Pendidikan
			Di kota semua pengawas sekolah / madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik	100%	2014	2011	100%	100%	100%	Dinas Pendidikan

No.	Bidang	Jenis Pelayanan Dasar	SPM		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)		Periodesasi Target Pencapaian Kota Madiun			Perangkat Daerah Penanggung jawab	
			Indikator	Nilai	Target Nasional	Target Kota Madiun	2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Kurikulum	Pemerintah kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif	100%	2014	2011	100%	100%	100%	Dinas Pendidikan	
		Penjaminan Mutu Pendidikan	Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan	100%	2014	2014	100%	100%	100%	Dinas Pendidikan	
		Pelayanan Pendidikan Dasar oleh Satuan Pendidikan	Sarana dan Prasarana	Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS dan PKn dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik	100%	2014	2014	100%	100%	100%	Dinas Pendidikan
				Setiap SMP/MTS menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik	100%	2014	2014	100%	100%	100%	Dinas Pendidikan
				Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA	100%	2014	2014	100%	100%	100%	Dinas Pendidikan

No.	Bidang	Jenis Pelayanan Dasar	SPM		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)		Periodesasi Target Pencapaian Kota Madiun			Perangkat Daerah Penanggung jawab
			Indikator	Nilai	Target Nasional	Target Kota Madiun	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap SMP dan MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi	100%	2014	2011	100%	100%	100%	Dinas Pendidikan
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan.	100%	2014	2011	100%	100%	100%	Dinas Pendidikan
			Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan pembelajaran sebagai berikut : Kelas I - II : 18 jam per minggu Kelas III : 24 jam per minggu Kelas IV – VI : 27 jam per minggu Kelas VII – IX : 27 jam per minggu	100%	2014	2011	100%	100%	100%	Dinas Pendidikan
		Kurikulum	Setiap satuan pendidikan menerapkan Kurikulum sesuai ketentuan yang berlaku	100%	2014	2011	100%	100%	100%	Dinas Pendidikan
			Setiap guru menerapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya	100%	2014	2011	100%	100%	100%	Dinas Pendidikan
		Penilaian Pendidikan	Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik	100%	2014	2011	100%	100%	100%	Dinas Pendidikan

No.	Bidang	Jenis Pelayanan Dasar	SPM		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)		Periodesasi Target Pencapaian Kota Madiun			Perangkat Daerah Penanggung jawab
			Indikator	Nilai	Target Nasional	Target Kota Madiun	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Penjaminan Mutu Pendidikan	Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester	100%	2014	2011	100%	100%	100%	Dinas Pendidikan
			Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada Kepala Sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik	100%	2014	2011	100%	100%	100%	Dinas Pendidikan
			Kepala Sekolah atau Madrasah menyampaikan laporan hasil Ulangan Akhir Semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta Ujian Akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan atau Kantor Kementerian Agama Kota Madiun pada setiap akhir semester	100%	2014	2011	100%	100%	100%	Dinas Pendidikan
			Manajemen Sekolah	Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip Manajemen Berbasis Sekolah	100%	2014	2011	100%	100%	100%
7.	Kesenian	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Bidang Kesenian	Cakupan Kajian Seni 50%	100%	2014	2012	100%	100%	100%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
			Cakupan Fasilitas Seni 30%	100%	2014	2012	100%	100%	100%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga

No.	Bidang	Jenis Pelayanan Dasar		SPM		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)		Periodesasi Target Pencapaian Kota Madiun			Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				Indikator	Nilai	Target Nasional	Target Kota Madiun	2017	2018	2019		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	
				Cakupan Gelar Seni 75%	100%	2014	2012	100%	100%	100%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	
				Cakupan Misi Kesenian 100%	100%	2014	2012	100%	100%	100%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	
				Sarana dan Prasarana	Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian 25%	100%	2014	2012	100%	100%	100%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
					Cakupan Tempat 100%	100%	2014	2013	100%	100%	100%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
					Cakupan Organisasi 34%	100%	2014	2013	100%	100%	100%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
8.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sumber Daya Air	Penyediaan air baku untuk kebutuhan masyarakat	Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari	100%	2019	2014	100%	100%	100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
				Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi sudah ada sesuai dengan kewenangannya	70%	2019	2014	88%	89%	90%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	

No.	Bidang	Jenis Pelayanan Dasar		SPM		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)		Periodesasi Target Pencapaian Kota Madiun			Perangkat Daerah Penanggung jawab		
				Indikator	Nilai	Target Nasional	Target Kota Madiun	2017	2018	2019			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11		
		Jalan	Penyediaan jalan untuk melayani kebutuhan masyarakat	Persentase tingkat kondisi jalan kota baik dan sedang.	60%	2019	2014	92,5	92,75	93%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang		
				persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kota	100%	2019	2014	100%	100%	100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang		
		Cipta Karya	Penyediaan Air Minum	Penyediaan Sanitasi	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	81,77%	2019	2014	90%	95%	100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
					Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	60%	2019	2019	22%	24%	25%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
					Persentase pengurangan sampah di perkotaan	20%	2019	2014	30%	30%	30%	Dinas Lingkungan Hidup	
					Persentase pengangkutan sampah	70%	2019	2014	85%	85%	85%	Dinas Lingkungan Hidup	
					Persentase pengoperasian TPA	70%	2019	2014	80%	80%	80%	Dinas Lingkungan Hidup	
					Persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) lebih dari 2 kali setahun	50%	2019	2014	85%	90%	95%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
					Penataan Bangunan dan Lingkungan	Persentase jumlah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan	60%	2019	2014	62%	65%	70%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

No.	Bidang	Jenis Pelayanan Dasar	SPM		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)		Periodesasi Target Pencapaian Kota Madiun			Perangkat Daerah Penanggung jawab	
			Indikator	Nilai	Target Nasional	Target Kota Madiun	2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan	Persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	10%	2019	2014	10%	10%	10%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
		Jasa Konstruksi	Pengembangan Sistem Informasi Jasa Konstruksi	Persentase tersedianya 7 (tujuh) jenis informasi tingkat Kota pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI)	60%	2019	2014	80%	85%	90%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Ijin Usaha Jasa Konstruksi	Persentase tersedianya layanan ijin usaha jasa konstruksi dengan waktu penerbitan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan lengkap	100%	2019	2014	100%	100%	100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
		Penataan Ruang	Informasi Penataan Ruang	Persentase tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang wilayah Kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	100%	2019	2015	100%	100%	100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dan BAPPEDA
		Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik	Persentase tersedianya luasan Ruang Terbuka Hijau Publik sebesar 20% dari luas wilayah Kota/ Kawasan perkotaan	50%	2019	2014	48,09%	52,09	56,10	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dan BAPPEDA	
9.	Perumahan Rakyat	Rumah Layak Huni dan Terjangkau	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	100%	2009-2025	2014	99,40%	99,41%	99,42%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
			Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	70%	2009-2025	2014	99,40%	99,41%	99,42%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	

No.	Bidang	Jenis Pelayanan Dasar		SPM		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)		Periodesasi Target Pencapaian Kota Madiun			Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				Indikator	Nilai	Target Nasional	Target Kota Madiun	2017	2018	2019		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	
		Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum		Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	100%	2009-2025	2016	98,00%	98,01%	98,02%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
10.	Ketenagakerjaan	Pelayanan Pelatihan Kerja		Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	60%	2016	2011	79%	80%	80%	Dinas Tenaga Kerja	
				Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	60%	2016	2012	73%	75%	75%	Dinas Tenaga Kerja	
		Palayanan Penempatan Tenaga Kerja		Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	40%	2016	2012	73%	76%	79%	Dinas Tenaga Kerja	
		Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial		Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama	50%	2016	2011	100%	100%	100%	Dinas Tenaga Kerja	
		Pelayanan Kepesertaan Jamsostek		Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek Aktif	50%	2016	2011	86%	95%	100%	Dinas Tenaga Kerja	
		Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan		Besaran Pemeriksaan Perusahaan		45%	2016	2016	kewenangan provinsi			Dinas Tenaga Kerja
				Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan		50%	2016	2011	kewenangan provinsi			Dinas Tenaga Kerja
11.	Sosial	Pelaksanaan program/ kegiatan bidang sosial	Pemberian bantuan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial skala kota	Persentase (%) PMKS skala kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	80%	2008-2015	2015	84,38%	85,98%	87,58%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	

No.	Bidang	Jenis Pelayanan Dasar	SPM		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)		Periodesasi Target Pencapaian Kota Madiun			Perangkat Daerah Penanggung jawab	
			Indikator	Nilai	Target Nasional	Target Kota Madiun	2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial skala kota	Persentase (%) PMKS skala kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	80%	2008-2015	2015	81%	81%	81%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Sosial	Penyediaan sarana prasarana panti sosial skala kota	Persentase (%) panti sosial skala kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	80%	2008-2015	2015	80%	80%	80%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti skala kota	Persentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	60%	2008-2015	2015	74%	74%	74%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Penanggulangan Korban Bencana	Bantuan sosial bagi korban bencana skala kota	Persentase (%) korban bencana skala kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	80%	2008-2015	2011	100%	100%	100%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Evakuasi korban bencana skala kota	Persentase (%) korban bencana skala kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	80%	2008-2015	2011	100%	100%	100%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No.	Bidang	Jenis Pelayanan Dasar	SPM		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)		Periodesasi Target Pencapaian Kota Madiun			Perangkat Daerah Penanggung jawab	
			Indikator	Nilai	Target Nasional	Target Kota Madiun	2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial	Penyelenggaraan jaminan sosial skala Kota	Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	40%	2008-2015	2017	40%	40%	40%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
12.	Lingkungan Hidup	Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air	Pencegahan	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air	20% 40% 60% 80% 100%	2009 2010 2011 2012 2013	2013				Dinas Lingkungan Hidup
		Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak	pencegahan	Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara	20% 40% 60% 80% 100%	2009 2010 2011 2012 2013	2013	100%	100%	100%	Dinas Lingkungan Hidup
		Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa	informasi status	Prosentase luasan lahan yang telah ditetapkan status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang diinformasikan	20% 40% 60% 80% 100%	2009 2010 2011 2012 2013	2013	100%	100%	100%	Dinas Lingkungan Hidup

No.	Bidang	Jenis Pelayanan Dasar	SPM		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)		Periodesasi Target Pencapaian Kota Madiun			Perangkat Daerah Penanggung jawab	
			Indikator	Nilai	Target Nasional	Target Kota Madiun	2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup	Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	50% 60% 70% 80% 90%	2009 2010 2011 2012 2013	2013	100%	100%	100%	Dinas Lingkungan Hidup	
13.	Perhubungan Daerah	Angkutan Jalan	Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan	Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kota.	75%	2014	2013	90%	90%	90%	Dinas Perhubungan
			Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan	Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan kota	60%	2014	2014	100%	100%	100%	Dinas Perhubungan
			Jaringan Prasarana Angkutan Jalan	Tersedianya halte pada setiap kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.	100%	2014	2012	100%	100%	100%	Dinas Perhubungan
			Jaringan Prasarana Angkutan Jalan	Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.	40%	2014	2011	100%	100%	100%	Dinas Perhubungan
			Fasilitas Perlengkapan Jalan	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan <i>guardrail</i>) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan kota.	60%	2014	2012	100%	100%	100%	Dinas Perhubungan

No.	Bidang	Jenis Pelayanan Dasar	SPM		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)		Periodesasi Target Pencapaian Kota Madiun			Perangkat Daerah Penanggung jawab
			Indikator	Nilai	Target Nasional	Target Kota Madiun	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji.	60%	2014	2012	100%	100%	100%	Dinas Perhubungan
		Sumber Daya Manusia	Tersedianya Sumber Daya Manusia di bidang terminal pada kota yang telah memiliki terminal.	50%	2014	2011	100%	100%	100%	Dinas Perhubungan
			Tersedianya Sumber Daya Manusia di bidang pengujian kendaraan bermotor pada kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor.	100%	2014	2011	100%	100%	100%	Dinas Perhubungan
			Tersedianya Sumber Daya Manusia di bidang Manajemen Rekayasa Lalu Lintas, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir pd kota	40%	2014	2012	100%	100%	100%	Dinas Perhubungan
			Tersedianya Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi sbg. pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum	100%	2014	2011	100%	100%	100%	Dinas Perhubungan
		Keselamatan	Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam kota	100%	2014	2011	100%	100%	100%	Dinas Perhubungan
14.	Komunikasi dan Informatika	Pelaksanaan Diseminasi Informasi Nasional	Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui :							

No.	Bidang	Jenis Pelayanan Dasar	SPM		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)		Periodesasi Target Pencapaian Kota Madiun			Perangkat Daerah Penanggung jawab
			Indikator	Nilai	Target Nasional	Target Kota Madiun	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			media massa seperti majalah, radio dan televisi	12 kali per tahun	2014	2012	12 kali per tahun	12 kali per tahun	12 kali per tahun	Dinas Komunikasi dan Informatika
			media baru seperti website (media online)	setiap hari	2014	2012	setiap hari	setiap hari	setiap hari	Dinas Komunikasi dan Informatika
			media tradisional seperti pertunjukan rakyat	12 kali per tahun	2014	2013	12 kali per tahun	12 kali per tahun	12 kali per tahun	Dinas Komunikasi dan Informatika
			media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi, dan lokakarya	12 kali per tahun setiap kecamatan	2014	2013	12 kali per tahun setiap kecamatan	12 kali per tahun setiap kecamatan	12 kali per tahun setiap kecamatan	Dinas Komunikasi dan Informatika
			media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk dan baliho	12 kali per tahun	2014	2013	12 kali per tahun	12 kali per tahun	12 kali per tahun	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	50%	2014	2012	100%	100%	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika

No.	Bidang	Jenis Pelayanan Dasar	SPM		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)		Periodesasi Target Pencapaian Kota Madiun			Perangkat Daerah Penanggung jawab
			Indikator	Nilai	Target Nasional	Target Kota Madiun	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.	Penanaman Modal	Kebijakan Penanaman Modal	Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan	1 (satu) sektor/ bidang usaha/ tahun	2014	2012	1 (satu) sektor/ bidang usaha/ tahun	1 (satu) sektor/ bidang usaha/ tahun	1 (satu) sektor/ bidang usaha/ tahun	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro
		Kerjasama Penanaman Modal	Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan	1 (satu) kali/ tahun	2014	2012	2 (dua) kali/ tahun	2 (dua) kali/ tahun	2 (dua) kali/ tahun	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro
		Promosi Penanaman Modal	Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal	1 (satu) kali/ tahun	2014	2012	1 (satu) kali/ tahun	2 (dua) kali/ tahun	2 (dua) kali/ tahun	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro
		Pelayanan Penanaman Modal	Terselenggaranya pelayanan perijinan dan non perijinan bidang penanaman modal melalui pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang penanaman modal	100%	2014	2018	60%	100%	100%	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro
		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha	1 (satu) kali/ tahun	2014	2014	1 (satu) kali/ tahun	1 (satu) kali/ tahun	1 (satu) kali/ tahun	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro

No.	Bidang	Jenis Pelayanan Dasar	SPM		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)		Periodesasi Target Pencapaian Kota Madiun			Perangkat Daerah Penanggung jawab
			Indikator	Nilai	Target Nasional	Target Kota Madiun	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Terimplementasikannya Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)	100%	2014	2018	60%	100%	100%	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro
		Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal	Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat	1 (satu) kali/ tahun	2014	2014	1 (satu) kali/ tahun	1 (satu) kali/ tahun	1 (satu) kali/ tahun	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro

WALIKOTA MADIUN

ttd

H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hum.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
SEKRETARIS DAERAH
u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM



BUDI WIBOWO, SH

Pembina

NIP. 19750117 199602 1 001